

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini membahas strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* sebagai bagian dari strategi keamanan regional di kawasan Amerika. Pembentukan koalisi ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya ancaman kartel narkotika, penyelundupan opioid, *narco-terrorism*, perdagangan ilegal, dan kejahatan transnasional yang dipandang Amerika Serikat sebagai persoalan keamanan kawasan. Dalam konteks tersebut, *Americas Counter Cartel Conference* menjadi forum penting yang digunakan Amerika Serikat untuk membangun dukungan regional dan mendorong terbentuknya kerja sama keamanan dalam menghadapi ancaman kartel narkotika.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* tidak hanya merupakan respons teknis terhadap ancaman narkotika, tetapi juga bagian dari strategi politik dan diplomatik Amerika Serikat dalam membentuk koalisi keamanan regional. Amerika Serikat menggunakan forum tersebut untuk membingkai kartel narkotika dan jaringan kriminal transnasional sebagai ancaman bersama yang membutuhkan respons kolektif dari negara-negara kawasan. Dengan demikian, pembentukan koalisi ini menunjukkan bahwa isu narkotika tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai persoalan domestik atau perbatasan

Amerika Serikat, tetapi sebagai isu keamanan regional yang membutuhkan dukungan multilateral.

Melalui kerangka *coalition-building* Marina E. Henke, penelitian ini menunjukkan bahwa koalisi yang dipimpin Amerika Serikat tidak terbentuk secara otomatis hanya karena adanya ancaman bersama. Koalisi dibentuk melalui proses diplomatik yang melibatkan pembentukan dukungan, pembacaan preferensi calon mitra, serta pemilihan negara-negara yang dianggap sesuai dengan tujuan dan desain kerja sama yang dibangun oleh negara pemimpin. Dalam konteks ACCC, Amerika Serikat berupaya membangun koalisi dengan menekankan agenda keamanan seperti *border security*, *countering narco-terrorism and trafficking*, perlindungan infrastruktur kritis, serta kerja sama bilateral dan multilateral dalam menghadapi ancaman lintas batas.

Jawaban atas rumusan masalah penelitian ini adalah bahwa strategi *coalition-building* Amerika Serikat dalam pembentukan *Americas Counter Cartel Coalition* dilakukan melalui tiga pola utama. Pertama, Amerika Serikat membentuk isu kartel narkoba dan kejahatan transnasional sebagai ancaman keamanan regional. Kedua, Amerika Serikat menggunakan *Americas Counter Cartel Conference* sebagai ruang diplomatik untuk membangun dukungan dan legitimasi terhadap agenda keamanannya. Ketiga, Amerika Serikat melakukan pemilihan mitra secara selektif dengan melibatkan negara-negara yang dianggap memiliki kesesuaian kepentingan, preferensi keamanan, dan kesediaan untuk mendukung desain kerja sama yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Ketidakterlibatan beberapa negara penting seperti Meksiko, Brasil, dan Kolombia menunjukkan adanya batas dalam strategi *coalition-building* tersebut. Ketiga negara tersebut memiliki posisi penting dalam isu keamanan, narkoba, dan kejahatan transnasional di kawasan Amerika Latin, tetapi tidak berada dalam komposisi awal koalisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan negara dalam koalisi tidak hanya ditentukan oleh kedekatan negara tersebut dengan sumber ancaman, tetapi juga oleh pertimbangan politik, kesesuaian strategi keamanan, dan penerimaan terhadap agenda kerja sama yang dibangun oleh Amerika Serikat. Dengan demikian, ACCC memperlihatkan adanya pola *partner selection* dan *selective cooperation* dalam pembentukan koalisi keamanan regional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Americas Counter Cartel Coalition* merupakan instrumen strategi keamanan regional Amerika Serikat yang dibentuk melalui proses *coalition-building* yang selektif dan strategis. Pembentukan koalisi ini memperlihatkan bahwa kerja sama keamanan regional tidak selalu mencakup seluruh aktor yang relevan terhadap ancaman, melainkan bergantung pada bagaimana negara pemimpin membangun dukungan, memilih mitra, dan menentukan bentuk kerja sama yang sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu, ACCC dapat dipahami sebagai contoh bagaimana Amerika Serikat menggunakan *coalition-building* untuk mengorganisasi respons regional terhadap kartel narkoba dan kejahatan transnasional, sekaligus menunjukkan bahwa koalisi keamanan regional tetap dipengaruhi oleh kalkulasi politik dan strategis negara pemimpin.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengkaji ACCC secara lebih mendalam apabila inisiatif tersebut telah berkembang ke tahap implementasi yang lebih konkret. Penelitian ini masih berfokus pada pembentukan awal, komposisi negara peserta, dan ketidakterlibatan Meksiko dalam inisiatif tersebut. Oleh karena itu, studi selanjutnya dapat meneliti bagaimana mekanisme kerja sama, pembagian peran antarnegara, serta efektivitas ACCC dalam menghadapi kartel narkoba dan kejahatan lintas batas.

Kedua, penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan posisi negara-negara yang tidak dilibatkan dalam ACCC, seperti Meksiko, Brasil, dan Kolombia. Penelitian ini hanya berfokus pada Meksiko karena negara tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan rantai penyelundupan opioid ke Amerika Serikat. Namun, absennya Brasil dan Kolombia juga penting untuk dikaji karena keduanya memiliki posisi besar dalam dinamika keamanan, politik, dan kejahatan transnasional di Amerika Latin. Kajian komparatif terhadap negara-negara tersebut dapat memperluas pemahaman mengenai pola selektivitas Amerika Serikat dalam membentuk kerja sama keamanan regional.

Ketiga, dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Amerika Serikat dalam menghadapi krisis opioid bahwa penanggulangan narkoba tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum semata. Kasus Amerika Serikat menunjukkan bahwa peredaran

narkotika sintetis dapat berkembang menjadi persoalan multidimensional yang berkaitan dengan kesehatan publik, keamanan perbatasan, kejahatan transnasional, serta stabilitas sosial. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kebijakan narkotika yang menggabungkan pencegahan, penindakan, rehabilitasi, pengawasan jalur masuk, serta deteksi dini terhadap perkembangan narkotika sintetis. Pendekatan ini penting agar negara tidak hanya merespons peredaran narkotika setelah menjadi krisis, tetapi juga mampu membangun sistem pencegahan yang lebih antisipatif.

Keempat, berkaca dari dinamika kerja sama keamanan Amerika Serikat dalam isu opioid, pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam menghadapi jaringan narkotika transnasional, tetapi tetap dengan memperhatikan prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional. Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada pertukaran informasi, pengawasan prekursor kimia, peningkatan kapasitas aparat, penguatan pengawasan pelabuhan dan perbatasan, serta koordinasi dengan negara-negara kawasan dalam memutus rantai distribusi narkotika. Namun, kerja sama tersebut perlu dijalankan secara seimbang agar tidak menempatkan Indonesia hanya sebagai objek dari agenda keamanan negara lain. Dengan demikian, pengalaman Amerika Serikat dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk membangun kebijakan narkotika yang lebih komprehensif, antisipatif, dan tetap selaras dengan prinsip kedaulatan nasional.

Kelima, bagi kajian hubungan internasional, penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan kerja sama keamanan regional tidak selalu bersifat inklusif

terhadap seluruh aktor yang relevan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori *coalition-building* untuk menganalisis kasus-kasus lain ketika negara pemimpin koalisi memilih mitra secara selektif. Pendekatan ini dapat membantu menjelaskan bagaimana kepentingan politik, preferensi keamanan, dan kesesuaian strategis memengaruhi keterlibatan suatu negara dalam kerja sama internasional.